

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA WISATA DI
DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG**

Yehezkiel Lucky Ririhena, Augustin Rina Herawati

**Program Studi S1 Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof.Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Community empowerment through the Tourism Village Program is a strategic approach to community-based tourism development aimed at improving social welfare and local independence. Kalongan Village, located in Ungaran Timur District, Semarang Regency, possesses diverse natural and cultural tourism potentials. However, the implementation of the Tourism Village Program still faces various challenges in empowering the local community. This study aims to analyze the process of community empowerment through the Tourism Village Program in Kalongan Village and to examine the factors related to its implementation. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consist of representatives from the Semarang Regency Tourism Office, Kalongan Village Government, Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and local community members. The results indicate that community empowerment in Kalongan Village has been carried out through the stages of awareness-building, capacity building, and empowerment. Nevertheless, the empowerment process has not yet been fully optimized due to limitations in human resource capacity, uneven community participation, and weak coordination among stakeholders. The study concludes that the Tourism Village Program in Kalongan Village has significant potential to enhance community welfare, but it requires strengthened capacity building, continuous assistance, and more inclusive empowerment strategies. Therefore, it is recommended that local stakeholders intensify community development efforts, strengthen local institutions, and optimize community participation in tourism village management.

Keywords: Community Empowerment, Tourism Village, Community-Based Tourism, Rural Development

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata merupakan salah satu strategi pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, memiliki potensi wisata alam dan budaya yang cukup beragam, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan serta menelaah faktor-faktor yang terkait dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Kalongan, Pokdarwis, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan telah dilaksanakan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Namun, proses pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat secara merata, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Program Desa Wisata di Desa Kalongan berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun memerlukan penguatan kapasitas, pendampingan berkelanjutan, dan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas pembinaan, penguatan kelembagaan lokal, serta optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Pembangunan Desa

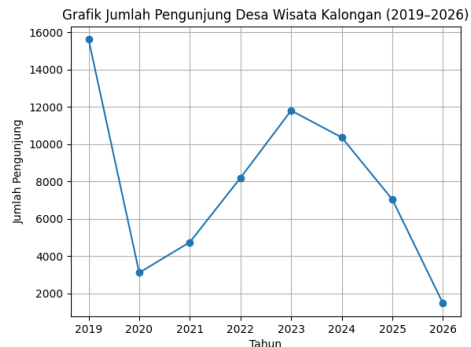
PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, pengembangan desa wisata menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan potensi lokal.

Pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada proses pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi publik, pemberdayaan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan desa wisata.

Desa Kalongan, Kabupaten Semarang, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam yang cukup besar, seperti bentang alam pedesaan, area persawahan, serta lingkungan yang masih asri. Selain potensi alam, Desa Kalongan juga memiliki potensi lokal berupa komunitas kreatif, seperti komunitas film, yang berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan dalam pengelolaan desa wisata.

Gambar 1. Grafik Jumlah Pengunjung Desa Wisata Kalongan Tahun 2019-2026



Sumber: Data Sekretaris Desa Kalongan (2026)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dari 15.624 pengunjung pada tahun 2019 menjadi 3.115 pengunjung. Setelah itu, jumlah kunjungan menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 11.810 pengunjung pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya jumlah kunjungan kembali mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2026 hanya tercatat 1.472 pengunjung yang dipengaruhi oleh kegiatan pemugaran atau renovasi fasilitas wisata.

Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Desa Kalongan belum berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan desa wisata masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kapasitas masyarakat, kelembagaan, maupun dukungan sarana dan prasarana.

Selain itu, manfaat ekonomi dari pengembangan desa wisata juga belum

dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya masih berada pada posisi pasif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara optimal.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan dengan menggunakan pendekatan tahapan pemberdayaan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

KAJIAN TEORI

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Pratidina Santoso, 2022).

Dalam konteks Desa Kalongan, konsep pemberdayaan masyarakat menjadi relevan untuk menjelaskan kondisi di mana masyarakat belum sepenuhnya terlibat

secara aktif dalam pengelolaan desa wisata. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya partisipasi masyarakat serta belum meratanya manfaat ekonomi yang dirasakan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam Pratidina Santoso (2022), Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto menjelaskan bahwa Pemberdayaan masyarakat umumnya dilakukan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahapan ini menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana proses pemberdayaan telah berjalan di Desa Kalongan. Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan yang terjadi menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya mampu menghasilkan pengelolaan desa wisata yang stabil dan berkelanjutan.

b. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pratidina Santoso (2022), Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu "proses menjadi" daripada sekadar "proses instansi". Menurut teori Wrihatnolo, ada tiga tahap pemberdayaan masyarakat yang harus diperhatikan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan tahap awal dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat didorong untuk memahami potensi yang dimiliki, mengenali persoalan yang dihadapi, serta menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Penyadaran tidak hanya berarti penyampaian informasi atau sosialisasi, tetapi juga proses membangun kesadaran kritis agar masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

Di Desa Kalongan, tahap penyadaran menjadi penting karena pengembangan desa wisata tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat belum memahami manfaat, tujuan, dan peluang yang dapat dihasilkan dari program tersebut. Ketika masyarakat hanya mengetahui keberadaan desa wisata secara umum, tetapi belum memahami bentuk keterlibatan yang dapat mereka lakukan, maka partisipasi yang muncul cenderung bersifat pasif. Oleh karena itu, penyadaran harus dipahami sebagai proses yang menghubungkan informasi dengan keterlibatan, sehingga masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga terdorong untuk ikut berperan.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan merupakan tahap lanjutan setelah masyarakat memiliki kesadaran awal terhadap potensi dan persoalan yang dihadapi. Pada tahap ini, masyarakat diberikan penguatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis maupun manajerial agar mampu berpartisipasi secara lebih efektif. Pengkapasitasan dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, serta pembelajaran berbasis pengalaman.

Dalam penelitian ini, tahap pengkapasitasan relevan untuk menjelaskan mengapa masyarakat Desa Kalongan belum sepenuhnya siap menjadi pengelola utama desa wisata. Meskipun telah ada pelatihan dan pendampingan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya, kapasitas masyarakat berkembang secara terbatas, tidak merata, dan belum cukup kuat untuk mendukung pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program pelatihan saja belum cukup, apabila tidak diikuti dengan pendampingan yang konsisten dan terencana.

3. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan

tahap di mana masyarakat diharapkan telah memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan ruang yang cukup untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri. Pada tahap ini, masyarakat tidak lagi hanya dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi sudah memiliki posisi sebagai pengambil peran utama yang dapat memanfaatkan peluang ekonomi, mengelola organisasi, serta membangun inisiatif secara berkelanjutan.

Di Desa Kalongan, tahap pendayaan menjadi indikator penting untuk melihat apakah program desa wisata benar-benar telah menghasilkan kemandirian masyarakat. Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan, manfaat ekonomi yang masih musiman, serta keterbatasan keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa pendayaan belum berjalan secara optimal. Masyarakat belum sepenuhnya memperoleh posisi tawar yang kuat dalam pengelolaan desa wisata, sehingga program masih lebih banyak bertumpu pada dukungan pemerintah desa maupun pengelola inti. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih berada pada tahap berkembang dan belum mencapai bentuk yang transformatif.

Ketiga tahapan tersebut menjadi

kerangka analisis utama dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan proses pemberdayaan secara bertahap, mulai dari pembentukan kesadaran, peningkatan kemampuan, hingga pencapaian kemandirian. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian dapat melihat secara lebih jelas bagian mana dari proses pemberdayaan yang sudah berjalan dan bagian mana yang masih perlu diperkuat di Desa Kalongan.

c. Faktor-Faktor yang Terkait Dengan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditentukan dari seberapa besar faktor yang mempengaruhi proses keberlangsungannya. Mardikanto dalam Sanmutiane (2024) mengungkapkan terdapat beberapa faktor pendorong dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor dasar dalam pengembangan desa wisata, karena menjadi modal utama yang dapat diolah menjadi daya tarik wisata. Potensi alam yang dimiliki desa dapat menjadi kekuatan pengembangan wisata apabila dikelola secara terencana dan berkelanjutan. Namun, potensi sumber daya alam yang besar tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak disertai kemampuan pengelolaan yang

memadai. Dalam kasus Desa Kalongan, potensi alam yang besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi daya tarik wisata yang terstruktur.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aktor utama dalam proses pemberdayaan. Kualitas sumber daya manusia menentukan sejauh mana masyarakat mampu memahami potensi desa, mengelola kegiatan wisata, membangun inovasi, dan menjaga keberlanjutan program. Keterbatasan kapasitas masyarakat akan berdampak pada lemahnya pengelolaan desa wisata. Di Desa Kalongan, keterlibatan masyarakat memang mulai ada, tetapi belum merata dan belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian.

3. Keadaan Kelembagaan

Kelembagaan berperan penting dalam mengatur hubungan antaraktor, membangun koordinasi, dan memastikan keberlanjutan program. Kelembagaan yang kuat akan memudahkan pembagian peran, pengambilan keputusan, serta pendampingan kepada masyarakat. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah akan membuat program berjalan secara sporadis dan bergantung pada individu tertentu. Dalam kasus Desa Kalongan,

kelembagaan telah terbentuk, tetapi belum berfungsi secara optimal sebagai sistem pengelolaan yang kolaboratif.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan kualitas pelayanan wisata dan efektivitas pengelolaan desa wisata. Keterbatasan fasilitas akan berdampak pada kenyamanan wisatawan, citra destinasi, serta motivasi masyarakat untuk terlibat. Di Desa Kalongan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan struktural yang memengaruhi perkembangan desa wisata.

5. Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan normatif dalam pengembangan desa wisata. Kebijakan menentukan arah program, pembagian peran, serta prinsip-prinsip pemberdayaan yang harus dijalankan. Namun, keberadaan kebijakan saja tidak cukup apabila tidak diikuti implementasi yang efektif. Dalam penelitian ini, kebijakan terkait desa wisata di Kalongan telah tersedia secara cukup jelas, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara substantif.

6. Organisasi dan Administrasi

Organisasi dan administrasi menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Organisasi yang jelas dan administrasi yang tertata akan mendukung pembagian kerja, pencatatan kegiatan, distribusi sumber daya, dan pengelolaan informasi. Di Desa Kalongan, struktur organisasi telah ada, tetapi pelaksanaan fungsi organisasi dan sistem administrasinya belum berjalan secara optimal.

Keenam faktor tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam desa wisata bukan hanya persoalan partisipasi masyarakat semata, tetapi juga persoalan tata kelola, kapasitas, sumber daya, dan keberlanjutan kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk memahami mengapa pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan belum sepenuhnya berjalan optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Kalongan, Kabupaten Semarang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

memengaruhi keberhasilannya.

Lokasi penelitian berada di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kalongan merupakan salah satu desa yang sedang mengembangkan program desa wisata, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengelolaan desa wisata.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan desa wisata. Informan penelitian terdiri dari pemerintah desa, pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat Desa Kalongan, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pemberdayaan masyarakat, kendala yang dihadapi, serta peran masing-masing aktor dalam pengembangan desa wisata. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model

Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan, Kabupaten Semarang. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka tahapan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Kerangka ini digunakan untuk melihat sejauh mana proses pemberdayaan telah berjalan serta mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan penguatan.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan

prasarana, kebijakan, serta organisasi dan administrasi. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk memahami keterkaitan antara potensi yang dimiliki dengan kemampuan pengelolaan yang ada di tingkat desa.

a. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan telah dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan pengelola desa wisata. Masyarakat pada dasarnya telah memperoleh informasi mengenai potensi desa wisata serta peluang yang dapat dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara awal, masyarakat telah memiliki tingkat pemahaman terhadap konsep desa wisata.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyadaran yang dilakukan belum mampu membangun kesadaran kolektif yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat masih bersifat situasional dan cenderung meningkat hanya ketika terdapat kegiatan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyadaran yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan sikap

dan perilaku masyarakat secara konsisten.

Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat (Pratidina Santoso, 2022), tahap penyadaran seharusnya mampu mengubah masyarakat dari kondisi tidak tahu menjadi tahu, dan dari tahu menjadi mau terlibat. Namun, di Desa Kalongan, proses tersebut masih berhenti pada tahap mengetahui, sehingga belum berkembang menjadi komitmen partisipatif yang kuat.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola desa wisata, baik dari aspek teknis maupun manajerial.

Meskipun demikian, pengkapasitasan yang dilakukan masih bersifat terbatas dan belum berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan belum menjangkau seluruh masyarakat dan cenderung terfokus pada kelompok tertentu, seperti pengurus Pokdarwis. Selain itu, materi pelatihan yang diberikan masih bersifat dasar dan belum menyentuh aspek manajerial, kewirausahaan, maupun pemasaran

secara mendalam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengkapasitasan belum mampu membangun kapasitas masyarakat secara kolektif. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, pengkapasitasan yang tidak berkelanjutan berpotensi menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepercayaan diri untuk terlibat secara aktif. Hal ini sejalan dengan temuan di Desa Kalongan, di mana masyarakat masih ragu untuk berpartisipasi karena belum memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai.

3. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan tahap di mana masyarakat diharapkan mampu mandiri dalam mengelola desa wisata serta memperoleh manfaat ekonomi secara nyata. Dalam praktiknya, pengelolaan desa wisata di Desa Kalongan telah melibatkan masyarakat melalui Pokdarwis sebagai lembaga pengelola.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayaan masyarakat belum berjalan secara optimal. Manfaat ekonomi dari desa wisata masih bersifat terbatas dan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Aktivitas wisata yang belum berjalan secara konsisten menyebabkan peluang

usaha yang muncul juga bersifat musiman.

Selain itu, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya masih berada pada posisi pasif dan menunggu arahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki kemandirian dalam mengelola desa wisata.

Dalam perspektif pemberdayaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pendayaan masih bersifat parsial dan belum mencapai tahap transformatif. Masyarakat belum sepenuhnya berperan sebagai subjek pembangunan, melainkan masih bergantung pada dukungan pemerintah dan pengelola utama.

b. Faktor-Faktor yang Terkait Dengan Pemberdayaan Masyarakat

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan modal dasar dalam pengembangan desa wisata karena menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Desa Kalongan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti lingkungan pedesaan yang masih asri dan potensi wisata alam lainnya. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan

secara optimal.

Keterbatasan dalam perencanaan dan pengelolaan menyebabkan potensi yang ada belum mampu dikembangkan menjadi produk wisata yang memiliki nilai jual tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk mendorong pemberdayaan masyarakat apabila tidak diikuti dengan kemampuan pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaan desa wisata. Dalam konteks Desa Kalongan, partisipasi masyarakat telah mulai terlihat, namun masih terbatas dan belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Sebagian masyarakat telah terlibat aktif dalam kegiatan desa wisata, khususnya melalui Pokdarwis, tetapi sebagian lainnya masih berada pada posisi pasif dan belum memahami peran yang dapat diambil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun kepercayaan diri, masih perlu ditingkatkan. Tanpa penguatan sumber daya manusia yang

berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat berpotensi hanya berjalan pada kelompok tertentu dan tidak berkembang secara kolektif.

3. Keadaan Kelembagaan

Kelembagaan memiliki peran penting dalam mengatur koordinasi, komunikasi, serta pembagian peran antar aktor dalam pengelolaan desa wisata. Di Desa Kalongan, kelembagaan telah terbentuk melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola utama.

Namun demikian, fungsi kelembagaan belum berjalan secara optimal. Koordinasi antar aktor masih terbatas, komunikasi belum berjalan secara merata, dan pembagian peran belum sepenuhnya jelas. Akibatnya, pengelolaan desa wisata masih bergantung pada individu tertentu yang aktif, bukan pada sistem kelembagaan yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelembagaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pilar dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata. Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak hanya memengaruhi

kenyamanan wisatawan, tetapi juga menentukan kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan wisata.

Dalam kasus Desa Kalongan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala utama. Fasilitas pendukung wisata masih terbatas dan belum dikembangkan secara khusus untuk kebutuhan pariwisata. Hal ini berdampak pada terbatasnya kegiatan wisata yang dapat dikembangkan serta rendahnya daya tarik desa wisata secara keseluruhan. Akibatnya, potensi ekonomi yang dapat dihasilkan juga belum maksimal.

5. Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan normatif dalam pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang ada pada dasarnya telah memberikan arah yang jelas bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan desa wisata.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan di Desa Kalongan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Kebijakan masih lebih berfungsi sebagai pedoman administratif, sementara implementasi di lapangan belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di tingkat lokal.

6. Organisasi dan Administrasi

Organisasi dan administrasi berperan dalam memastikan bahwa pengelolaan desa wisata berjalan secara sistematis, terstruktur, dan akuntabel. Struktur organisasi pengelola desa wisata di Desa Kalongan telah terbentuk, namun belum diikuti dengan pelaksanaan fungsi organisasi yang optimal.

Pengelolaan masih cenderung bergantung pada individu tertentu, sementara sistem administrasi dan komunikasi belum berjalan secara efektif. Distribusi informasi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat tidak terlibat secara aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola organisasi masih perlu diperkuat agar mampu mendukung pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan belum berjalan secara optimal. Proses pemberdayaan masih bersifat parsial, di mana tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan belum terintegrasi secara berkelanjutan.

Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata belum stabil.

Kondisi ini berdampak langsung pada keberlanjutan program serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Selain itu, keterbatasan kapasitas masyarakat, kelembagaan yang belum kuat, serta dukungan sarana dan prasarana yang terbatas menjadi faktor utama yang menghambat pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Meskipun kebijakan desa wisata telah mendorong pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya di tingkat lokal belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan belum berjalan secara optimal. Pada tahap penyadaran, masyarakat telah memperoleh informasi mengenai desa wisata, namun kesadaran tersebut belum berkembang menjadi partisipasi aktif yang berkelanjutan. Pada tahap pengkapasitasan, upaya peningkatan kemampuan masyarakat telah dilakukan, tetapi masih terbatas, tidak merata, dan belum berkelanjutan.

Sementara itu, pada tahap pendayaan, masyarakat belum sepenuhnya mandiri dalam mengelola desa wisata. Hal ini ditandai dengan manfaat ekonomi yang masih bersifat terbatas dan belum merata, serta keterlibatan masyarakat yang masih

didominasi oleh kelompok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih bersifat parsial dan belum mencapai tahap kemandirian yang berkelanjutan.

Selain itu, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses pemberdayaan masyarakat, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, kebijakan, serta organisasi dan administrasi. Meskipun Desa Kalongan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, keterbatasan pada aspek kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan sarana prasarana menyebabkan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan masih berada pada tahap berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek kapasitas masyarakat, kelembagaan, serta tata kelola program agar pemberdayaan dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

teknologi, yang secara tidak langsung mendorong individu untuk memanfaatkan layanan digital pemerintah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tahap Penyadaran

Pemerintah desa dan pengelola desa wisata perlu meningkatkan intensitas sosialisasi

secara berkelanjutan dengan disertai kejelasan peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, perlu disusun sistem kaderisasi dan regenerasi dalam kelembagaan Pokdarwis agar partisipasi masyarakat dapat terjaga secara konsisten dan tidak bergantung pada individu tertentu.

2. Peningkatan Kualitas Pengkapasitasan

Program pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan lebih terarah, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga mencakup manajemen usaha, pemasaran, pencatatan keuangan, dan pengembangan produk wisata. Pendampingan yang kontinu diperlukan agar masyarakat mampu mengimplementasikan pengetahuan secara nyata dalam pengelolaan desa wisata.

3. Penguatan Koordinasi Kelembagaan

Diperlukan pembagian peran yang tegas antara Pokdarwis, BUMDes, dan pemerintah desa untuk menghindari tumpang tindih tugas. Penegasan fungsi masing-masing lembaga akan mendukung efektivitas pengelolaan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program desa wisata.

4. Pengembangan Tahap Pendayaan

Upaya pendayaan masyarakat perlu diperkuat melalui diversifikasi produk wisata serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada kunjungan wisata musiman dan meningkatkan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

5. Penguatan Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan desa, seperti fasilitasi promosi digital, pembangunan jejaring kemitraan dengan pihak swasta, serta perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pengelola desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W., Chuang, H. M., Gunawan, U. P., Nadila, D., & Maulana, I. (2023). Community Empowerment through the Development of the Cisaat Tourism Village, Subang Regency. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(1), 30–39. <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i1.642>
- Akbar, S., Noviyanti, E., Khadijah, U. L. S., & Deinaputra, R. D. (2021). Community Empowerment in the Context of Sustainable Tourism Development in Surodadi Village. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(2), 131–146. <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i2.39164>
- Al-Khairiyah, F. T., & Maryatin. (2024). *Strategi pemberdayaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan Desa Wisata Kalongan di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. SINOVA: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang, 6(1), 14–26.
- Firmansyah, B. F., & Fakhruddin. (2025). *Pengelolaan Desa Wisata berbasis Community-Based Tourism pada Desa Wisata Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang*. TAMASYA: Jurnal Pariwisata Indonesia, 2(2), 92–106.
- Handayani, A. V. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Pratidina Santoso, A. A. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(November), 33–48. <https://doi.org/10.33701/j3p.v7i2.2930>
- Sanmutiane, A., Hanani, R., & Santoso, R. S. (2024). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 388–411.
- Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi Di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan)*. *Publika*, 881–894. <https://doi.org/10.26740/publika.v1>

Suksmawati, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Based Tourism Pada Program Desa Wisata. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 13(1).
<https://doi.org/10.33005/jbi.v13i1.3070>

Buku

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (third). Sage Publications, Inc.

Subarsono, S. (2017). Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Vol. 6, Issue 1).

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (p. 234). Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. Alfabeta.

Rachmawati, E. (2021). *Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata*. Syiah Kuala University Press.